

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Yunus Wahid. 2006. *Hukum Pengawasan Pemerintah*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Amelia Chyadini, et.al. 2023. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Makassar: Phinatama Media.
- Ahmad Redi, et.al., 2020, *Indonesia The Mining Law Review: Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad Turodi, 2023, *Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah*, Semarang: Mutiara Aksara.
- Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arip Rahman Sudrajat. 2022. *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik*. Purwokerto: CV. Amerta Media.
- Bahrudin, et al. 2022. *Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Dwi Heryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Balunijuk: UBB Press.
- Dr. Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- H. Ade Kasih Supriatna. 2022. *Restorasi Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menuju Good Governance di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Hufron dan Hadi Husodo Tjandra. 2023. *Konsep Pengaturan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- I Made Suwandi, 2017, *Refleksi Otonomi Daerah di Indonesia*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Joko Pramono. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Joko Pramono. 2022. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Moh. Roofi Adji Sayekti, *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*, Klaten: Cempaka Putih.
- Nanang Nugraha, 2017, *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Novita Wulandari, Mhd Iqbal, dan Ahmad Widianoro. 2025. *Meningkatkan Implementasi Kebijakan Publik Melalui Reformasi Perizinan*. Sulteng: Feniks Muda Sejahtera

- Nurul Qomariah, Ni Nyoman Putu Martini, & Putu Ayu Rusmayanti. 2023. *Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jember: UM Jember Press.
- Ratna Wati dan Ika Sartika. 2024. *Memahami Proses, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Victor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudin Rahman, et.al., 2023, *Paradigma Baru Otonomi Daerah & Daerah Otonom*, Purbalingga: CV Diva Pustaka.
- Yudi Suparyanto, 2018, *Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI*, Klaten: Cempaka Putih.
- Zepthi, 2023, *Pertambangan dan Energi*, Depok: Cerdas Interaktif (Penebar Swadaya group).

Jurnal

- Albert Morangki, 2012, *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertahanan*, Repository Unstrat, Vol.20 No.3, Manado, hlm.63.
- Aldiani Fitriayu Sam, et al. 2024. "Analisis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2.
- Anin, Selviana, Agustinus Longa Tiza & Yohanes Fritantus. 2024. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menangani Kebersihan Lingkungan di Terminal Kefamenanu." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 1, hlm. 10-18.
- Aura Fariza Yulianti Saputri, et al. 2024. "Implementasi Keselamatan Kerja di Pertambangan melalui Penerapan Sistem Manajemen K3 Berbasis ISO 45001." *Journal of Educational Innovation and Public Health*, Vol. 2 No. 3: 20-27.
- Evander Kaendung, et al. 2021. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado." *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2.
- Indra Kristian. 2023. "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21 No. 2.
- Jorawati Simarmata. 2016. "Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4: 348.
- Jus Samuel Sihotang. 2023. "Good Governance dalam Pelayanan Publik." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, hlm. 188-201.
- Mohammad Jhanattan, et al. 2023. "Mining Management of Nonmetallic Minerals and Rocks Based on Government Policy." *International Journal of Environmental Impacts*, Vol. 6 No. 4: 165-181.
- Muh. B. A. Wicaksono, I. G. K. R. Handayani & Lego Karjoko. 2022. "The Administrative Law Enforcement on Coal Reclamation Obligations Violations in Indonesia." *BiLD Law Journal*, Vol. 7 No. 2s: 463-468.
- Muh Hasrul. 2019. "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah." *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Nurcahyati, Ayu. 2021. "Pendekatan Pengawasan dalam Sistem Perizinan Tambang: Dari Preventif ke Represif." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 2: 145-152.
- Raihany Nur Zahra & Nina Yuliana. 2023. "Peran Komunikasi yang Efektif sebagai Kunci Menuju Kesuksesan." *Socius*, Vol. 1 No. 5: 169-174.
- Ratu Triani Ayune Wulan Suci. 2022. "Law Enforcement on Management of Limestone Mining Without Permits According to Law Number 3 of 2020." *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 3 No. 3: 379-402. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.56286>.
- Retno Sari Dewi. 2020. "Regulasi Pertambangan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 5 No. 1: 69-80.
- Zulkifli Aspan. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Takabonerate." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2: 74.
- Zulkifli Aspan. 2017. "Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar." *Amanna Gappa*, Vol. 25 No. 2, hlm. 12.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Skripsi/Tesis

- Fachriadi Nandar. 2021. *Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Hamida. 2016. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sumber Internet

- Salmaa. 2023. "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh." *Deepublish*. Diakses dari: <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, pada 24 Januari 2024 pukul 23.06 WITA.